

**ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA *FRAUD*
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Al Husna Bissidqi

Nomor Mahasiswa : 10312216

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

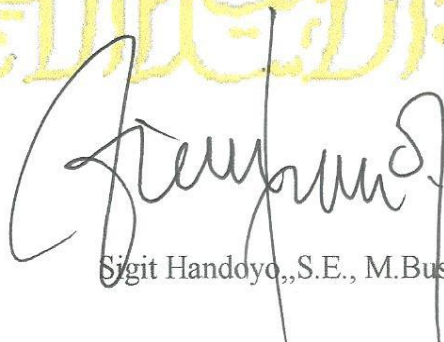
ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA FRAUD

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA

SALATIGA



Dosen Pembimbing.



Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Kecenderungan Terjadinya Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Salatiga

Disusun Oleh : **Al Husna Bissidqi**
Nomor Mahasiswa : **10312216**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 13 Mei 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Sigit Handoyo, , S.E., M.Bus.

Penguji : Rifqi Muhammad, , S.E., M.Sc., SAS



Mengetahui
Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si

**ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA FRAUD
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA
SALATIGA**

Skripsi S1

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana strata-1 di Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

ditulis oleh :

Nama : Al Husna Bissidqi

Nomor Mahasiswa : (10312216)

Jurusan : Akuntansi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penyusun,

(Al Husna Bissidqi)

**ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA FRAUD
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA
SALATIGA**



Sigit Handoyo,,S.E., M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI BERJUDUL
ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADNIYA FRAUD
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA
SALATIGA

Disusun Oleh : Al Husna Bissidqi

Nomor Mahasiswa : 10312216

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan

Pada tanggal :2014

Pembimbing Skripsi/Penguji : Sigit Handoyo,,S.E., M.Bus.

Penguji :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Prof. Hadri Kusuma, MBA, DBA

MOTTO

“Hai manusia, sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa”

(QS. Al-Baqoroh : 21)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujaadilah : 11)

“Jika kamu bersyukur atas karunia-Ku, pasti akan Aku tambah untukmu, dan jika kamu berlaku ingkar, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(Q.S. Ibraahimm : 7)

“ Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan shalat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“ Pada setiap kesusahan pasti ada jalan keluar. Kehidupan harus dijalani dengan semangat, terus berusaha, senantiasa berdo'a, selalu bersyukur, dan yakin pasti bisa.”

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan mempermudah baginya suatu jalan untuk menuju ke surga.”

(Riwayat Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

***Maha Besar Allah S.W.T atas segala ridho rahmat dan nikmatnya
memberikan semua kemudahan, kelancaran serta keberhasilan***

☞ ***Orang tua tercinta "Bapak Buana achmad Thuba & Ibu Niken Lidiastuti "***

" Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk baktiku pada ibu dan bapak.

Terimakasih atas segala Doa dan support nya dalam menyelesaikan skripsi ini,,,Sampai kapan pun aku akan terus berusaha membahagiakan bapak ibu dan akan terus berusaha menjadi anak yang terbaik dan berusaha menjadi panutan yang baik untuk adik-adik,,,"

☞ ***Kakak-kakakku "Al Ardli Kamal Firdaus, Ilhami Al Kautsari,,S.H., S.pt.,
M.kn. dan Zu'ama Janatu Adnin "***

*"kakak – kakaku yang selalu kujadikan sebagai panutan nasehatnya yang
kujadikan acuan terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya"*

☞ ***Teman teman yang selalu ada***

*"Terimakasih atas support segala bantuan, dukungan dan segala nasihat
yang amat sangat berguna."*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam karena berkat Rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw, karena berkat perjuangan beliau kini ummatnya dapat menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian yang berjudul ***“Analisis Pola Kecenderungan Terjadinya Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Salatiga”*** adalah penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pola Kecurangan atau Fraud dan pola penanganannya di Salatiga. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi bagi para praktikan yang bekerja di bidang akuntansi ataupun audit.

Proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan berupa dukunga doa, moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak dibawah ini:

- Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
- Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA, DBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Bapak Sigit Handoyo,,S.E., M.Bus., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih pak atas segala nasehat, bimbingan dan setiap pertemuan yang berkesan.
- Ibu Fitriati Akmila,,S.E., M.Com. selaku dosen pembimbing akademik.
- Ibu Isti Rahayu., Dra., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Orang tua tercinta,bapak H.Buana Achmad Thuba,S.H dan Ibu Hj.Niken Lidiastuti,S.H., M.H., terima kasih untuk doa, semangat serta bimbingannya. Semoga selalu bisa menjadi anak yang sholeh bagi bapak dan ibu dan dapat selalu membahagiakan bapak dan ibu.
- Bapak dan ibu kepala SKPD, kepala unit, kepala bagian, staf-staf pengadaan barang dan pihak-pihak lain dari Pemerintah Kota Salatiga, yang menjadi narasumber pada penelitian ini. Terima kasih atas kesediaannya dan kepercayaannya kepada penulis untuk berbagi banyak hal tentang informasi dan pengalamannya baik yang berhubungan dengan penelitian ini maupun yang tidak.

- Kakak-kakaku . Terima kasih atas doa dan dukungannya.
- Siti Nestiti Listyo Ningrum yang selalu setia dan sabar menemaniku. Terima kasih juga untuk segala dukungan dan motivasinya dalam mengerjakan skripsi ini.
- Sahabatku sedari SMA Ragil, Bonny, Gega, Abel, Vino. Terima kasih selalu mengunjungiku di jogja dan support . *Hail our brotherhood.*
- Teman sedari semester 1 spesialis peghilang stress Surya Alfat, terimakasih atas segala metode-metodenya untuk menghilangkan stress.
- Sahabat serta keluarga besar jalan bali no 6, : Riawan Arbi kusuma, Priyo Prasetyo, Donny Dewantoro, Dwika Reza. “Kalian luar biasa”.
- Teman veteran sedari SMP . M.Dwika Reza,,S.H , M. Eka Nanda Yudha,, S.kom. Terimakasih atas semua semangat-semangat yang diberikan. Semoga tercapai cita-cita dan tujuan kita untuk menjadi pengusaha bersama.
- Teman-teman KKN Mukti, Fitri, Dana, Resa, Didin, Mada. Terima kasih atas segala motivasinya dan seluruh pembelajaran hidup.
- Teman seperjuangan dari salatiga. Terimakasih bantuan yang kalian berikan sungguh berarti.
- Teman-teman penikmat masa muda, “segenap teman *ex-perumahan* MBS”. Terimakasih *refreshing*-nya selalu dapat mengembalikan tawa. *Chill out every day.*

- Teman-teman yang menjadi mentor, penasehat, dan sebagainya. Terimakasih setiap masukan dapat terus membuat saya menjadi lebih maju.
- Teman-teman YAC Aikido club Yogyakarta. Terimakasih atas semua tempaan mental dan fisik membuat saya menjadi lebih baik.
- Teman-teman satu bimbingan. Sukses untuk kita semua.
- Teman-Temanku di Fakultas Ekonomi UII yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu .Terimakasih atas dukungan teman-teman semua.
- Segenap dosen FE UII yang telah memberikan banyak sekali ilmu, pengalaman dan nasehat kepada penulis.
- Terakhir untuk segenap pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *Jazakumullah khoir*. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstraksi	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 pengertian <i>Fraud</i>	8
-----------------------------------	---

a. Jenis Kecurangan	12
b. Sympton of fraud	16
c. red flag	16
d Teori Fraud Triangle	17
e. Klasifikasi Fraud	17
2.2 Pengendalian Internal.....	18
a. Definisi Sistem Pengendalian.....	18
b. Komponen Pengendalian Internal.....	18
2.3 Ketaatan Aturan	23
2.4 Perilaku Tidak Etis.....	24
a. Pengertian Etika dan Perilaku Etis	24
b. Prinsip-Prinsip Etis	25
c. Penyebab Perilaku Tidak Etis	27
2.5 Pengertian Pengadaan	27
a. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	27
b. Pola Penyimpangan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa ..	28
c. Ciri-ciri Sistem Pengadaan Efektif.....	30
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Penelitian	35
2.8 Hipotesis.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	38

3.2. Populasi dan Sampel	38
3.3. Variable Penelitian	39
3.3.1. Kecenderungan Terjadinya <i>Fraud</i>	39
3.3.2. Perilaku Tidak Etis	39
3.3.3. Keefektifan Pengendalian Internal	39
3.3.4. Ketaatan Aturan	39
3.4. Teknik Analisis data	39
3.4.1 Metode Analisis Data	40
1. Uji Kualitas Data	40
a. Uji Validitas	40
b. Uji Reliabilitas	41
3.4.2 Uji Normalitas dan Asumsi Klasik	41
a. Uji Normalitas	41
b. Uji Asumsi Klasik	42
1. Multikolinieritas	42
2. Heteroskedastisitas	42
3.4.3 Uji Hipotesis	43
a. Uji Partial t	45
 BAB IV ANALISIS DATA	
4.1. Analisis Diskriptif	47
4.1.1. Karakteristik Responden	47
4.2. Uji Validitas Instrumen	50

4.3. Uji Reliabilitas Instrumen	52
4.4. Uji Asumsi Klasik	53
4.4.1 Uji Normalitas.....	53
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	54
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.5. Uji Hipotesis dan Pembahasan.....	56
4.5.1 Uji Regresi Linier Berganda	57
4.5.2 Hasil Pengujian Signifikansi dengan Uji t	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Keterbatasan.....	60
5.3 Saran.....	61

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

Lampiran

LAMPIRAN.....	66
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Klasifikasi Fraud	17
2.2. Kerangka Penelitian	35
4.1. Hasil Uji Normalitas	53
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Hasil Penyebaran Kuisioner	47
4.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	48
4.4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja	49
4.6. Hasil Uji Validitas Item-item Variable Penelitian	51
4.7. Hasil Uji Reliabilitas	52
4.8. Hasil Uji Multikolinieritas	54
4.9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I Surat Penelitian	66
II Kuisisioner	68
III Tabulasi Data Penelitian	76
IV Hasil Olah Data.....	82
i. Statistik Deskriptif.....	82
ii. Uji Validitas dan Reliabilitas	88
iii. Uji Regresi.....	94

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji variable keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan terjadinya fraud. Populasi penelitian ini adalah pegawai Dinas di Pemerintahan Kota Salatiga yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa. Alat statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi berganda(*multiple regression*) dengan bantuan *SPSS versi 17.0*. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Sedangkan variabel ketaatan aturan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Terakhir, variable perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Kata kunci : Kecenderungan Tejadinya *fraud*, keefektifan pengemdalian internal, ketaatan aturan, perilaku tidak etis.

Abstract

The aim of the research was to examine the effect of affectivities of internal control, obedience of rule, and unethical behavior in tendency of fraud. The populations are civil servant who worked in the government on Salatiga at several departments. Statistic tools used to test the hypotheses is multiple regressions with SPSS version 17.0. The result of analyze showed that affectivities of internal control have significant negative influence to the tendency of fraud. Although that the variable of obedience rules have not significant negative influence to the tendency of fraud. The variable unethical behavior has significant positive influence to the tendency of fraud.

Keyword: tendency of fraud, affectivities of internal control, obedience of rules, unethical behavior.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fraud adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi.

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri termasuk dalam peringkat yang cukup tinggi yaitu 114 dengan skor 32 (*Transparency International*, 2013). Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi, baik yang berupa korupsi (*Corruption*), penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), maupun *Fraudulent Statements* (Albrecht, 2009). Kecurangan di atas telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).

Teori *Fraud Triangle* dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: *pressure* atau tekanan, *Opportunity* atau

kesempatan, dan *Rationalization* atau Pembenaran. Tekanan adalah keinginan pegawai untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak eksternal maupun eksternal. Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Rasionalisasi adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi kesenjangan integritas pribadi pegawai atau penalaran moral yang lain.

Meningkatnya praktik kecurangan di pemerintahan di dorong oleh berbagai kondisi, menurut Tuanakotta (2007), mereka yang terlibat dalam perbuatan curang didorong oleh interaksi antar kekuatan-kekuatan dalam kepribadian individu dan lingkungan eksternal. Kekuatan kekuatan tersebut diklasifikasi kedalam tiga kategori utama : (1) tekanan situasional, (2) kesempatan dan, (3) karakteristik (integrasi) pribadi.

Kecurangan tidak terjadi begitu saja, selalu ada pelakunya. *Symptoms* diterjemahkan menjadi gejala. Dimana *fraud* dapat dirasakan dengan adanya gejala *fraud*, yaitu: ketidak normalan catatan akuntansi, internal control yang rendah, ketidak normalan dalam menganalisis, perubahan gaya hidup, perilaku tidak biasa, dan tips, serta keluhan (Albrecht, 2009).

Dalam suatu penelitian tentang tindak kecurangan di instansi pemerintah, salah satu hasil menyebutkan bahwa tindak kecurangan yang paling sering terjadi di instansi Pemerintah menurut aktifitasnya adalah pengadaan barang dan jasa. Tindak kecurangan terjadi di seluruh tahapan proses pengadaan. Pada proses pelelangan

terjadi tindak kolusi antar rekanan dengan pejabat pemerintahan dengan penunjukan langsung pemenang atau rekayasa pemenang. Pada saat penawaran penetapan harga di rekayasa agar pihak-pihak terkait diuntungkan. Pada saat pelaksanaan rekanan memberikan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kontrak. Banyak juga *pass through vendor* dalam proses pengadaan (Kurniawati, 2009). Hal ini sejalan dengan pernyataan *Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD)* yang menyatakan : “...as the government activity most vulnerable to corruption. As a major interface between the public and the private sectors, public procurement provides multiple opportunities for both public and private actors to divert public funds for private gain”. (OCED; 2007: 9).

Secara normatif, konsep pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam pasal 1 butir 1 PerPres No. 54 Tahun 2010, yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kemudian sudah di perbarui dengan PerPres No. 70 tahun 2012.

Menurut (Tuanakotta, 2006) dalam bukunya yang berjudul —*Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* , kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik di Indonesia gagal karena cacat dalam beberapa hal, yaitu: Kerangka Hukum Cacat, tidak ada undang-undang pengadaan nasional selain undang-undang konstruksi (Keppres No. 18/1999). Keputusan Presiden yang mengatur pengadaan di luar

konstruksi (Keppres No. 18/2000), walaupun merupakan perbaikan besar dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap membatasi persaingan yang menuntut persaingan adil antara perusahaan-perusahaan yang setara. Mardiasmo (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan audit pemerintahan di Indonesia, yaitu : 1) tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi sektor public karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur dan 2) berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, yang overlapping satu dengan lainnya, yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan. Dalam buku –Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi juga menyebutkan bahwa pengadaan public merupakan sumber utama kebocoran negara. Selain itu sistem pengadaan Indonesia tidak berfungsi, adanya cacat sistematis dan kolusi pada tender pengadaan.

Adapun beberapa data yang mengungkapkan mengenai anggaran belanja kota salatiga sebesar Rp. 126,481,274,235.00 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kota lain di sekitar kota salatiga. Dengan anggaran yang kecil adapun *track record* kecurangan yang terjadi, beberapa di antaranya : korupsi jalan lingkar selatan kota salatiga sepanjang 6,5km sekitar 12 milyar; kasus pengadaan Buku Ajar sebesar Rp 17,6 milyar. Beberapa kasus yang masih berjalan dan diselidiki adalah kasus Selasar Kartini proyek bernilai sekitar Rp 7 milyar.

Dari berbagai data mengenai kecurangan di Kota Salatiga dan berbagai jenis yang ada serta berbagai faktor yang mempengaruhi, maka muncul ketertarikan untuk meneliti hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang terjadi di Kota Salatiga.

Penelitian ini menarik dilakukan karena terjadinya *fraud* semakin hari memiliki pola yang Beragam, adapun beberapa hal yang dapat memicu terjadinya *fraud* yang saling berketerpautan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah “**ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA SALATIGA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang mendasari penelitian ini adalah :

1. Apakah Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya :

- a. Bagi Pemerintah terkait

Di harapkan Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota Salatiga untuk mengidentifikasi *fraud* atau praktik kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa agar dapat menekan pratik-praktik *fraud* yang ada dalam instansi pemerintah di Instansi pemerintah khususnya wilayah Kota Salatiga. Menambah pengetahuan tentang kecenderungan terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa serta dapat menjadi alternatif untuk

menanggulangi bocornya pos-pos anggaran yang bisa di salah gunakan oleh *fraudster*.

b. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan mengenai aturan yang berlaku dan pengetahuan terapan, serta memberi informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan, sumbangan pemikiran, dan dijadikan bahan pembelajaran serta penelitian selanjutnya demi berkembangnya ilmu pengetahuan ditengah masyarakat.

d. Bagi Penulis

Penulis akan lebih dapat memahami penerapan teori-teori dan pengetahuan-pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah terutama berkaitan dengan judul yang dipilih.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Fraud

Merurut hukum dimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, UU Tindak Korupsi pengertian fraud merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki suatu harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil atau curang. Kecurangan dapat lahir terhadap barang atau benda.

Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan "pencurian dengan penipuan", "pencurian dengan tipu daya atau muslihat", "pencurian dengan penggelapan dan penipuan" atau hal serupa lainnya. Ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang

salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

Definisi Fraud (Ing) menurut Black Law Dictionary adalah :

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan;
- b. penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;
- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Menurut Kamus Hukum, mengartikan Fraud (Ing) = Fraude (Bld) sebagai kecurangan = Frauderen/verduisteren (Bld) : menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP. Sedangkan dalam Wikipedia (en.wikipedia.org), memberikan definisi Fraud sebagai berikut: Kecurangan

merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/curang.

Kecurangan dapat mahir melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya.

Fraud dapat didefinisikan sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dibidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain. (suhermadi, 2006).

Dari beberapa definisi atau pengertian Fraud (Kecurangan) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- a. Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation);
- b. dari suatu masa lampau (past) atau sekarang (present);
- c. fakta bersifat material (material fact);
- d. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly);
- e. dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- f. Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan tersebut (misrepresentation);
- g. yang merugikannya (detriment).

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau

pihak lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan pengertian *fraud* seperti :

1. Pasal 372 : Penggelapan (definisi KUHP : *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*);
2. Pasal 378 : Perbuatan curang (definisi KUHP : *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*);
3. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999).

a. Jenis Kecurangan

Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), kecurangan terbagi dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*) yaitu penyalahgunaan/pencurian asset perusahaan atau pihak lain.
2. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*) yaitu jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dan saling menikmati keuntungan. *Fraud* jenis ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu cybercrime. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Cybercrime juga akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Selain itu, pengklasifikasian fraud (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

- a. Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- 1) Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (fraud open on-the-books, lebih mudah untuk ditemukan);
- 2) Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: kickback (fraud hidden on the-books);
- 3) Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (fraud off-the books, paling sulit untuk ditemukan).

b. Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- 1) Tidak berulang (non-repeating fraud). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan walaupun terjadi beberapa kali pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).
- 2) Berulang (repeating fraud). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus

melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

c. Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik bona fide maupun pseudo. Dalam bona fide conspiracy, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam pseudo conspiracy, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

d. Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kecurangan khusus (specialized fraud), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1) pengambilan aset yang disimpan deposito pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga custodial fraud) dan (2) klaim asuransi yang tidak benar.
- 2) Kecurangan umum (garden varieties of fraud) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: kickback, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

Faktor - Faktor Situasional Kecurangan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Tekanan

Tekanan merupakan suatu perangsang yang berhubungan dengan motivasi karyawan untuk melakukan kecurangan sebagai hasil ketamakan atau tekanan keuangan pribadi diantara bermacam pertimbangan.

b. Faktor Rasionalisasi

Faktor rasionalisasi merupakan pertimbangan perilaku yang curang sebagai suatu konsekuensi dari suatu ketiadaan integritas pribadi karyawan, atau penalaran moral lain.

c. Faktor Peluang

Sebagai suatu kelemahan di dalam sistem, dimana karyawan memiliki kuasa (tenaga atau kemampuan) untuk memanfaatkan kemungkinan berbuat curang.

b. *Sympton of fraud*

Sympton diterjemahkan menjadi gejala. Gejala tindakan *fraud* terdiri dari ketidaknormalan catatan akuntansi, pengendalian internal yang lemah, ketidaknormalan dalam menganalisis, perubahan gaya hidup, perilaku tidak biasa dan tips serta keluhan. (Albrecht, 2009).

c. *Redflag*

Redflag merupakan pendeteksian penyimpangan dilihat dari karakteristik *fraudster*. salah satu contoh *redflag* biasanya berkaitan dengan gaya manajemen seperti agresifan seorang pemimpin. Contoh lain adalah *redflag* yang biasa dilakukan pegawai seperti perubahan gaya hidup, perubahan emosional. (Albrecht, 2009)

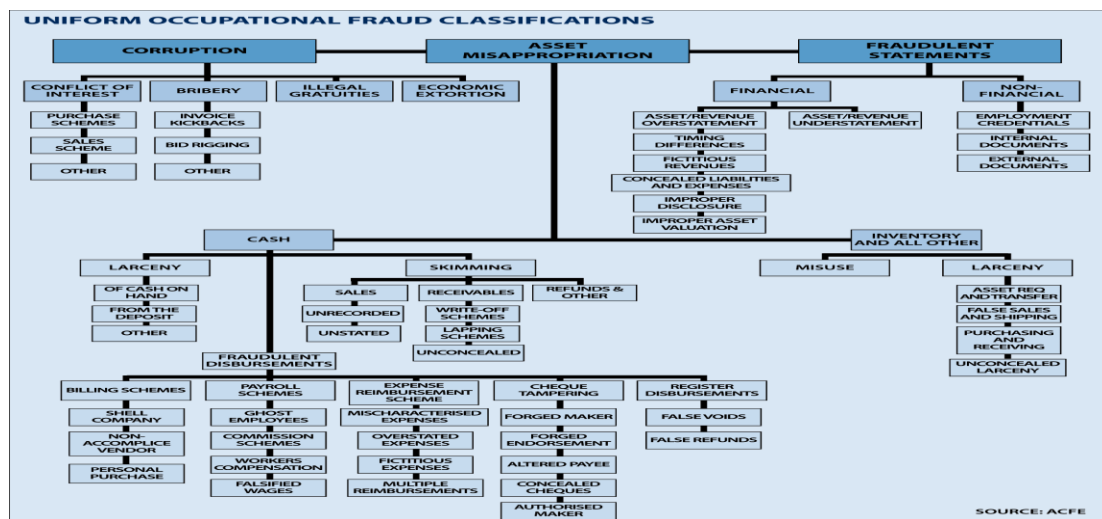
d. Teori Fraud Triangle

Teori *Fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Dalam buku “*Fraud Examination* “ (Albrecht, 2009) dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Peluang), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). *Pressure* (Tekanan).

e. Klasifikasi Fraud

The Association fo Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah —*Fraud Tree* yaitu **Uniform Occupational Fraud Classification System**, dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Klasifikasi Fraud



Sumber : ACFE 2010

2.2 Pengendalian Internal

a. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Committee of sponsoring organization (COSO) pada tahun 1992 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang didesain untuk menghasilkan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan dalam laporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan sistem pengendalian internal mencakup susunan organisasi dan semua metode beserta kebijakan/ peraturan yang terkoordinasi dalam perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi:

- a. Harta kekayaan perusahaan
- b. Memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi
- c. Meningkatkan efisiensi operasi usaha
- d. Mendorong ke arah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan

b. Komponen Pengendalian Internal

Committee of sponsoring organization (COSO) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari enam komponen. Kelima komponen tersebut berasal dari para manajemen dalam menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Keenam komponen tersebut adalah:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menentukan "warna" dari sebuah perusahaan, memberikan pengaruh kesadaran akan pengendalian kepada orang-orang di dalam perusahaan. Komponen ini merupakan dasar dari komponen-komponen pengendalian intern lainnya. Menurut SPAP (1994) Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Subagiono Tjondro (2003), faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah:

- 1) Falsafah manajemen dan gaya usaha Falsafah manajemen dan gaya usahamerupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter perusahaan dan keryawan. Filosofi manajemen merupakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Gaya usaha mencerminkan ide-ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilakukan.
- 2) Struktur organisasi satuan usaha Struktur ini dibentuk untuk tujuan mengatur kerja dalam organisasi yang didalamnya terdiri dari orang-orang sebagai pelaku yang terbagi atas beberapa level. Untuk itu perlu dibuat struktur organisasi yang mengatur hak, tanggung jawab dan wewenang, yang akhirnya dilengkapi dengan job deskripsi yang jelas. Semakin efektif struktur organisasi, semakin baik pelaksanaan tugas serta pengawasan mudah dilakukan. Hal ini didasarkan pada munculnya tanggung jawab yang jelas di masing-masing level.
- 3) Berfungsinya dewan komisaris dan komite yang terbentuk Dewan komisaris merupakan wakil para pemegang saham dalam perusahaan

perseraan. Dewan komisaris berfungsi mengawasi pengelola perusahaan yang dilaksanakan direksi. Apabila dewan komisaris aktif dalam menjalankan tugas, besar kemungkinan dapat mencegah konsentrasi di tangan direksi. Jika dewan komisaris di dominasi oleh jajaran direksi, maka hubungan akuntan publik dengan dewan komisaris menjadi tak berarti. Oleh karena itu dewan komisaris yang dipilih dari pihak luar akan berkontribusi efektif dalam pengawasan dan peran dewan komisaris dapat menghasilkan pemeriksaan yang andal.

- 4) Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab Struktur yang ada di organisasi memiliki implikasi terhadap tanggung jawab, wewenang serta konsekuensi lain yang melekat di berbagai jenjang manajemen. Bagi manajemen yang sehat pengertian wewenang dan tanggung jawab harus disertai dengan job deskripsi yang jelas, sehingga muncul garis komando yang proposional dan tidak terjadi tumpang tindih.
- 5) Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja, termasuk audit intern.
- 6) Kebijakan dan praktisi personalia Unsur ini berkaitan dengan praktek usaha yang sehat, karena sebaik apapun sistem pengendalian, apabila tidak didukung oleh personel yang *jujur* tidak akan berarti apa-apa.
- 7) Faktor-iaktor ekstern yang mempengaruhi operasi dan dan praktek usaha, seperti pemeriksaan oleh badan legislatif dan lembaga pemerintah.

b. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap entitas dalam melaksanakan aktivitas akan menghadapi berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam pencapaian tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola.

c. Aktivitas pengawasan (*control Activities*)

Aktivitas pengawasan meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengaman harta serta pemisahan tugas.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

informasi yang relevan perlu diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan. Dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan tanggung jawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

c. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja sistem pengendalian intern pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui audit intern atau melalui kedua-duanya.

f. Audit Internal

Audit internal berfungsi untuk menilai efektivitas dari pengendalian suatu organisasi dan melaporkan kepada manajemen dimana pengendalian internal dapat diperkuat. Selain, transaksi audit keuangan, aktivitas audit internal juga dapat mencakup bidang non-keuangan seperti unit bisnis, area geografi dan hukum. Perry and Bryan (1997) berpendapat bahwa audit internal memainkan peran penting dalam pencegahan dan penditeksian kecurangan dalam organisasi dengan memastikan bahwa audit direncanakan dengan baik dengan program audit internal yang wajar. Moyes and Baker (1995) menemukan bahwa penggunaan teknik audit ditingkatkan untuk membantu mengidentifikasi pengendalian internal yang lemah dan memperkecil kecurangan.

Komponen-komponen tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang lain. Dalam lingkungan pengendalian intern, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus. Kesinergian komponen-komponen tersebut, membentuk suatu sistem yang terintegrasi yang dinamis. Sistem pengendalian internal terjalin dengan aktivitas organisasi.

Pengawasan ini merupakan alat yang paling efektif yang dibangun kedalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu organisasi, menghindari biaya-biaya yang tidak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah.

2.3 Ketaatan Aturan

Menurut Wolk and Tearney (1997: 93-95) dalam penelitian (Wilopo, 2006) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Roberts *et al.*, (2002:23) berpendapat bahwa cara profesi diorganisir, melalui antara lain kode etik, dan ketaatan atas aturan akuntansi, akan memberikan pengaruh serta mengendalikan perilaku manajemen perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pendapat tersebut di atas, di antaranya adalah dari Larkin (2000), D'Aquila (2001), serta Adams *et al.*, (2001). Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Maroney (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi hukum yang mungkin diterimanya sehingga dalam kondisi ada elemen pengendalian internal ia tidak akan melakukan perbuatan yang akan menyebabkan dirinya diberi hukuman. Hasil penelitian ini turut mendukung penelitian dari Maroney (2006) yang menemukan bahwa peraturan dapat menjadi alat pencegah yang efektif agar seseorang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah perilaku tidak etis manajemen perusahaan.

2.4 Perilaku Tidak Etis

a. Pengertian Etika dan Perilaku Etis

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:58) dalam pengertian “etika” merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:58) perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis yaitu:

1) Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku pada organisasi.

2) Kondisi politik

Kondisi politik merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

3) Perekonomian global

Perekonomian global merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya materian individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:77-78) beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, diantaranya adalah sebagai berikut

1) Komitmen Hukum dan Sosial

Perilaku tanggung jawab secara sosial terhadap para karyawan memiliki komponen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan.

2) Komitmen Etis: Kasus Khusus Para Pengadu (*Wishle-Blower*)

Menghargai karyawan sebagai manusia juga berarti menghargai perilaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis.

b. Prinsip-prinsip Etis

Menurut Alvin A. Arens (2006:108) terdapat beberapa prinsip etis, antara lain:

1) Tanggung Jawab

Dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

2) Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmennya dan profesionalnya.

3) Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tinggi.

4) Objektivitas dan Independensi

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

5) Keseksamaan

Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab professional serta sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6) Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

c. Penyebab Perilaku Tidak Etis

Arens dan Loebbecke (1997:73) menyebutkan bahwa, terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu:

- 1) Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
- 2) Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.

2.5 Pengertian Pengadaan

Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007,) pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Menurut Edquist et al (2000), pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas.

a. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

Secara normatif, konsep pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KepPres No. 54 Tahun 2010, yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

b. Pola Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap (Amiruddin; 2010 : 46 - 47) :

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi (a) Perencanaan pengadaan barang dan jasa, (b) pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, (c) penetapan sistem pengadaan barang dan jasa, (d) penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa (e) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan (e) penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
2. Tahap Proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan meliputi (a) pemilihan penyedia barang dan jasa dan (b) penetapan penyedia barang dan jasa.
3. Tahap penyusunan kontrak.
4. Tahap pelaksanaan kontrak. Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada masing-masing tahap pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, adalah: penggelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
 - b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada

suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).

- c. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
- d. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
- e. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
- f. Harga dasar tidak standar.
- g. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
- h. Dokumen lelang tidak standar.
- i. Dokumen lelang yang tidak lengkap.

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah (a) jangka waktu pengumuman singkat. (b) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (*ambiguous*), (c) penyebaran dokumen tender yang cacat, (d) pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap, (e) *aanwijzing* dirubah menjadi tanya jawab, (f) upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat

menyampaikan dokumen penawarannya, (g) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal, (h) panitia bekerja secara tertutup, (h) pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu, (i) tidak seluruh sanggahan ditanggapi, (j) surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelicin .

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, adalah penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada .

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan berita acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran. Bertolak dari pola penyimpangan di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.

c. Ciri – ciri Sistem Pengadaan Efektif

Menurut Tuanakotta (2007), Dalam buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi menyebutkan ada beberapa hal yang dapat membuat rezim pengadaan barang efektif :

- Kerangka hukum yang jelas, komprehensif dan transparan yang mewajibkan, anatara lain: pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan-kesempatan penawaran, pengungkapan sebelumnya tentang semua kriteria untuk mendapatkan kontrak., pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria untuk mendapatkan kontrak, pemberian kontrak yang didasarkan atas kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, pemapran public bagi penawaran-penawaran, akses mekanisme peninjauan untuk keluhan penawaran, pengungkapan public dari hasil-hasil proses pengadaan, dan pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.
- Kejelasan tentang tanggungjawab-tanggungjawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan aturan ditaati, dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan-aturan itu dilanggar.
- Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan untuk pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal, badan ini jangan bertanggung jawab pula untuk proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggungjawab-tanggungjawabnya.
- Suatu mekanisme penegakkan. Tanpa penegakan,kejelasan aturan dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaaan public dan memulai tindakan terhadap mreka yang melanggar

aturan-aturan. Dan pemerintah perlu menetapkan mekanisme mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari penawar.

- Staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan sehat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian yang mengkaji tentang “Praktik Kecurangan Akuntansi dalam Perusahaan” menyebutkan terdapat tiga pelaku kecurangan akuntansi yang mencakup Karyawan dan pihak manajemen. Kemudian eksternal perusahaan (Suyoso, 2010).

Dalam Penelitian tentang Kecurangan akuntansi di BUMN yang diteliti oleh (Wilopo, 2006) diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi angka kecurangan di perusahaan (BUMN). Beberapa faktor tersebut adalah : 1) Perilaku tidak etis dimana bila jumlah kasus perilaku tidak etis perusahaan meningkat maka bisa disimpulkan kecenderungan kecurangan akuntansi akan meningkat, 2) Ketaatan aturan akuntansi atas pencatatan transaksi bila meningkat maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan menurun, 3) Keefektifan pengendalian internal tentu berarti semakin efektif pengendalian yang dilakukan perusahaan akan menurunlah jumlah kecurangan akuntansi yang ada, 4) Moralitas manajemen yang mendasari sikap dan perilaku yang manabila moralitas manajemen tinggi akan berdampak baik terhadap angka kecenderungan kecurangan akuntansi, 5) Asimetri informasi yang

semakin tinggi akan mengakibatkan kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi pula.

Dari salah satu penelitian yang lebih dulu yaitu “analisis *fraud* di sektor pemerintah kota Salatiga” hasil penelitian yang di kemukakan berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di Kota Salatiga , yaitu : Gaya kepemimpinan, Budaya etis organisasi, Penegakan hukum dan Kompensasi Pegawai (pramudita, 2013). Dari keseluruhan faktor bila cukup baik maka akan menekan jumlah terjadinya *fraud*.

Peneliti menemukan kajian serupa tentang analisi *fraud* sektor pemerintah kota wilayah Kudus, beberapa komponen yang di kaji memiliki kemiripan dengan penelitian di wilayah salatiga. Faktor-faktor tersebut yaitu : Gaya kepemimpinan, penegakan hukum, kultur organisasi, pengendalian intern, perilaku tidak etis dan kompensasi (Faisal, 2013). Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian Wilopo, Faisal mengangkat komponen kompensasi pegawai sebagai faktor terjadinya *fraud* di kota Kudus.

Dalam kecurangan pengadaan barang/jasa terdapat pola-pola penyimpangan pengadaan barang/jasa yang telah di teliti oleh (Amiruddin, 2012) pada penelitiannya disebutkan terdapat 4 tahapan penyimpangan. Pertama , pola penyimpangan barang/jasa tahap persiapan, di indikasi pada saat persiapan sudah terjadi seperti : *mark-up*, pegarahan pada supplier tertentu, rencana tidak realistis, panitia bekerja tertutup, harga tidak standar, dokumen lelang tidak lengkap. Kedua, pola penyimpangan barang/jasa tahap proses, di indikasi terjadi penyimpang yang

menjurus untuk bekerja sama dengan supplier atau yang dapat menguntungkan diri pribadi. Ketiga tahap penyusunan dan otorisasi, kemungkinan dokumen fiktif untuk lelang pengadaan di sinyalir kerap terjadi. Keempat, pola penyimpangan tahap pelaksanaan dan penyerahan barang/jasa kerap adanya ketidaksesuaian spesifikasi dengan spesifikasi saat lelang.

Karakteristik terjadinya kecurangan biasanya akan timbul gejala-gejala atau *fraud symptoms* pada manajemen. Menurut (Koroy, 2008) karakteristik tersebut adalah *nonirregularities hypothesis* atau ketidak beresan, inconsistency description atau ketidakjelasan dan deskripsi menyesatkan, dan *avoidance tactics* atau taktik untuk menutupi sesuatu.

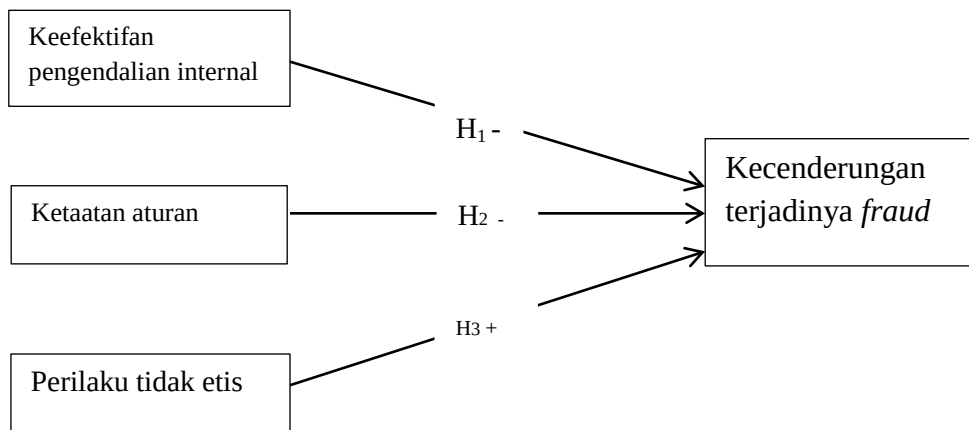
Teori *fraud triangle detection* diketahui dapat membantu mendeteksi kecurangan dalam suatu entitas. Pengembangan teori dilakukan oleh (Kusumawardhani, 2011) yang mendefinisikan klasifikasi *triangle* pada laporan keuangan, yaitu : *financial stability, Personal financial need, effective monitoring*.

2.7 Kerangka Peneliti

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai berikut

Model kerangka pemikiran peneliti

Gambar 2.2 Kerangka penelitian



2.8 Hipotesis

Hubungan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

Dengan mempunyai kerangka pengendalian yang efektif akan semakin memperkecil kemungkinan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Adanya suatu sistem pengendalian internal yang baik oleh instansi maka akan menurunkan tingkat kecurangan, dan sebaliknya sistem pengendalian internal yang buruk akan menjadi kesempatan para pegawai untuk melakukan kecurangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang di kemukakan oleh (Wilopo, 2006) yang menyatakan keefektifan pengendalian internal signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Adanya pengendalian yang efektif akan membantu mengawasi pegawai untuk menanggulangi terjadinya *fraud*.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud

Hubungan ketaatan aturan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

Aturan merupakan sebuah pedoman, dalam konteks ini pedoman untuk melaporkan mempertanggung jawabkan proses pengadaan dan juga pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Bila regulasi yang ada tidak di taati maka akan banyak sekali rekayasa dalam berbagai pelaporan kegiatan pengadaan barang. Maka penelitian ini berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat ketidak taatan aturan maka kecenderungan terjadinya *fraud* akan semakin tinggi.

Wolk and Tearney (1997: 93-95) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Roberts *et al.*, (2002:23) berpendapat bahwa cara profesi diorganisir, melalui antara lain kode etik, dan ketaatan atas aturan akuntansi, akan memberikan pengaruh serta mengendalikan perilaku manajemen perusahaan. Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pendapat tersebut di atas, di antaranya adalah dari Larkin (2000),

D'Aquila (2001), serta Adams *et al.*, (2001). Dengan demikian semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah perilaku tidak etis manajemen perusahaan.

H2: Ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud

Hubungan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

Dalam suatu organisasi nilai-nilai etika sangat erat kaitannya dengan lingkungan pengendali. Kondisi lingkungan pengendali yang buruk akan menurunkan nilai etika. Dalam konteks pekerjaan atau organisasi nilai etika dapat digambarkan dalam perilaku pegawai. Perilaku buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Ini sesuai dengan penelitian (Wilopo, 2006) diperoleh hasil bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

Perilaku tidak etis mendorong pegawai melakukan *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya negara. Dalam konteks ini etika pribadi menjadi krusial, salah satu pola *fraudster* untuk melakukan *fraud* untuk kepentingannya sendiri dengan terbiasa berperilaku tidak etis, merupakan kewajaran bagi pegawai untuk menggunakan kekuasaan dan kedudukan untuk kepentingan pribadi.

H3: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya fraud

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengumpulan kuisioner pada responden. Sumber data berupa pendapat dan interpretasi dari pegawai pemerintah daerah Kota. Yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan kota Salatiga. Tersebar di beberapa dinas dan atau unit di pemerintahan kota salatiga.

3.2 Populasi dan sampel

Telah diketahui bahwa setiap dinas pada pemerintahan kota memiliki anggaran untuk melakukan pengadaan barang dan jasa . maka dari itu sample dari penenelitian di ambil dari beberapa dinas di pemerintah kota Salatiga Salatiga yaitu DPPKAD, Bagian Adm Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Disdikpora, Kantor lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi Pengadaan dan akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian pengadaan dan akuntansi/penatausahaan keuangan. Kuisioner dikirim kepada responden yang dipilih berdasarkan tanggung jawabnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2009:199).

3.3 Variable Penelitian

3.3.1 Kecenderengan terjadinya *fraud*

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan terjadinya *fraud* terdiri dari lima item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.2 Perilaku tidak etis

Perilaku tidak etis diukur dengan instrument empat item pertanyaan dan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur.

3.3.3 Keefektifan pengendali internal

Instrument untuk mengukur keefektifan pengendalian internal menggunakan lima item pertanyaan dan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.4 Ketaatan aturan

Ketaatan aturan diukur dengan menggunakan lima item pertanyaan berkaitan dengan standar operasional pelaksanaan diukur dengan skala likert 1-5.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah mengetahui data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan

kuesioner yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai.

3.4.1 Metode Analisis Data

Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS 17.0*. Setelah semua data-data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari :

1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur berdasarkan teori-teori dan ahli. Dengan kata lain, semakin tinggi validitas suatu test maka alat test tersebut semakin tepat mengenai sasarannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Untuk menguji validitas konstruk suatu alat test bisa menggunakan metode korelasi yaitu korelasi alat test yang diajukan dengan membangunnya. Pada

penerapannya, uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan korelasi pearson antara tiap variabel pertanyaan terhadap rata-rata dari tiap konstruk pertanyaan tersebut (Cooper 1997). Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai koefisien korelasi $> r$ tabel maka dapat dinyatakan item tersebut valid sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid .

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji Reliabilitas ditujukan untuk mengetahui stabilitas dan konsistensi di dalam pengukuran.

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan Cronbach Alpha Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $r_{\alpha} > 0.60$.

3.4.2 Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendekati

normalitas dapat melihat grafik *Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2000:214).

Dasar pengambil keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, serta (2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Asumsi Klasik

1). Multikolinearitas

Multikolinearitas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Santoso (2000: 206) menyatakan bahwa deteksi adanya multikolinearitas dibagi menjadi 2 yaitu: (a) besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai nilai *Tolerance* mendekati 1, serta (b) besaran korelasi antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (di bawah 0,5).

2). Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas terjadi jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di *studendized*.

Dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut: (a) jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar), maka telah terjadi heteroskedastisitas dan (b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gujarati (1995: 187) menyatakan: “deteksi heterokedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan residual. Jika hasil uji Glejser signifikan, maka telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika hasil uji Glejser tidak signifikan, maka model regresi tersebut bebas heterokedastisitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

Model regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variable. Pengujian masing-masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing-masing koefisien regresi dengan uji signifikan t.

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$KTF = \alpha + \beta_1 KPI + \beta_2 KA + \beta_3 PTE + \varepsilon$$

Keterangan:

KTF	= Kecenderungan Terjadinya <i>Fraud</i>
KPI	= Kefektifan pengendalian Internal
KA	= Ketaatan aturan
PTE	= Perilaku tidak etis
α	= konstanta, yaitu nilai KTF jika variabel KPI, KA, dan PTE bernilai nol
$\beta_1, \dots, \beta_4$	= koefisien regresi
ε	= kesalahan residual

Keefektifan Pengendalian Internal

H1 : Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa

$H_{01} ; \beta_1 \leq 0$: Keefektifan Pengendalian Internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa

$H_{a1} ; \beta_1 > 0$: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa

Ketaatan Aturan

H2 : Ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa

$H_{02} ; \beta_2 \leq 0$: Ketaatan aturan tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

$H_{a2} ; \beta_2 > 0$: Ketaatan Aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

Perilaku Tidak Etis

H_3 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

$H_{o3} ; \beta_3 \leq 0$: perilaku tidak etis tidak berpengaruh positif terhadap Kecenderungan terjadinya *fraud*

$H_{a3} ; \beta_3 > 0$: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*

Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi uji statistik ini meliputi :

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika p value < 0,05 maka H_a diterima dan jika p value > 0,05 maka H_a ditolak.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul. Data tersebut merupakan hasil jawaban responden yaitu pegawai di tingkat pemerintahan kota pada 7 dinas pada staf bagian yang menangani perihal pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan daerah kota yang berada di kota Salatiga. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah di kemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menyajikan data dalam bentuk tabel presentase. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisi yang di dasarkan pada perhitungan statistic untuk membuktikan hipotesis yang di ajukan dalam penelitian.

Peneiti telah menyebar kuesioner sebanyak 57 eksemplar dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 50 eksemplar, sehingga total eksemplar data kuesioner dapat di jadikan sebagai sumber data sebanyak 50 respondeng atau besar prosentase 87,72%.

Hasil penyebaran kuesioner dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner

	Jumlah
DPPKAD	12
Bag. Adm Pembangunan Setda	7
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	10
Disdikpora	10
Kantor Lingkungan Hidup	8
Dinas Pertanian dan Perikanan	10
Kuesioner yang dikirim	57 eksemplar
Kuesioer yang tidak kembali	7 eksemplar
Kuesioner yang dapat diolah	50 Eksemplar

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis dalam skripsi ini menggambarkan analisis deskriptif atas jawaban yang diberikan untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Analisa deskriptif digambarkan untuk menguraikan tentang karakteristik dari suatu keadaan dari obyek yang diteliti. Responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 50 orang, yaitu Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kota Salatiga bagian pengandaan barang dan jasa.

4.1.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi, jenis kelamin, umur dan masa jabatan serta latar belakang pendidikan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang jenis kelamin dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pria	28	56%
Wanita	22	44%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer Diolah *Spss.17*, 2014.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah Pria sebanyak 28 responden atau besar prosentase 56% dan wanita sebanyak 22 responden atau besar prosentase 44%.

b. Umur Responden

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
< 35 tahun	11	22%
35 - 45 tahun	24	48%
> 45 tahun	15	30%
Total	50	100.0%

Sumber : Data Primer Di olah *Spss.17*, 2014.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah yang berusia kurang dari 35 tahun sebanyak 11 responden atau

besar prosentase 22%. Pegawai yang berusia 35 – 45 tahun sebanyak 24 responden atau besar prosentase 48% dan yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 15 responden atau besar prosentase 30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi umur pegawai negeri sipil yang bekerja pada bagian pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah kota Salatiga berusia 35 – 45 tahun.

c. Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S1	35	70%
S2	15	30%
Total	50	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah *Spss.17*, 2014

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat di simpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah yang berpendidikan S1 sebanyak 35 responden atau besar prosentase 70% , dan responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 15 orang atau besar prosentase 30%. Hal ini menunjukkan jumlah pegawai negeri sipil di bagian pengadaan barang dan jasa memiliki latar belakang tingkat pendidikan rata-rata S1.

d. Masa kerja

Berdasarkan masa kerja, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lama kerja	Jumlah (orang)	Persentase (%)
< 5 tahun	2	4%
5 - 9 tahun	19	38%
10 – 15 tahun	13	26%
16 – 20 tahun	9	18%
>20 tahun	7	14%
Total	50	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah *Spss.17*, 2014.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 2 responden atau besar prosentase 4%, masa kerja 5 – 9 tahun sebanyak 19 responden atau besar prosentase 38%, masa kerja 10 – 15 tahun sebanyak 13 responden atau besar prosentase 26%, masa kerja 16 – 20 tahun sebanyak 9 responden atau besar prosentase 18% dan masa kerja lebih dari 20 tahun sebanyak 7 responden atau besar prosentase 14%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang bekerja pada bagian pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah kota Salatiga memiliki rata-rata masa kerja 5 – 9 tahun.

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, peneliti akan melakukan uji validitas dan reliabilitas data atau kuesioner dengan tujuan untuk membuktikan alat ukur atau instrument penelitian ini telah memenuhi syarat valid dan handal.

4.2 Uji Validitas Instrumen

Kuesioner sebagai instrument penelitian harus memenuhi syarat valid, maka peneliti melakukan uji terlebih dahulu dengan uji validitas. Uji validitas digunakan

untuk mengetahui item yang terdapat pada kuesioner atau instrument penelitian mampu mengukur perubahan yang didapatkan dalam penelitian. Jika nilai koefisien korelasi $> r$ tabel, maka dapat dinyatakan item tersebut valid, sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner dapat dinyatakan valid. Dengan jumlah 50 responden maka dapat diketahui r tabel berasal dari $df=(N-2)$ pada level signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,2787. Berikut hasil uji validitas menggunakan SPSS.17 :

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Item-item Variable Penelitian

Variabel	Item	r hitung	r tabel	keterangan
Keefektifan Penendalian Internal	KP1	0,626	0,2787	valid
	KP2	0,897	0,2787	valid
	KP3	0,548	0,2787	valid
	KP4	0,897	0,2787	valid
	KP5	0,548	0,2787	valid
Ketaatan Aturan	KA1	0,630	0,2787	valid
	KA2	0,612	0,2787	valid
	KA3	0,850	0,2787	valid
	KA4	0,795	0,2787	valid
	KA5	0,551	0,2787	valid
	KA6	0,605	0,2787	valid
Perilaku Tidak Etis	PTE1	0,467	0,2787	valid
	PTE2	0,345	0,2787	valid
	PTE3	0,765	0,2787	valid
	PTE4	0,658	0,2787	valid
	PTE5	0,675	0,2787	valid
Kecenderungan Kecurangan	KF1	0,886	0,2787	valid
	KF2	0,589	0,2787	valid
	KF3	0,359	0,2787	valid
	KF4	0,886	0,2787	valid

Sumber : Data Primer Diolah Spss.17, 2014.

4.3 Uji Reliabilitas Instrumen

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha*, dengan jumlah sampel uji kuesioner sebanyak 50 responden. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliable apabila nilai $r_{\alpha} > 0,60$. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS.17*. Jika nilai $\alpha > 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0,80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Berikut tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Varaibel	Koef. Cronbach's Alpha	Batasan minimum	Keterangan
Keefektifan Pengendalian Internal	0,856	0,6	Reliabel / Handal
Ketaatan Aturan	0,859	0,6	Reliabel / Handal
Perilaku Tidak Etis	0,798	0,6	Reliabel / Handal
Kecenderungan <i>Fraud</i>	0,835	0,6	Reliabel / Handal

Sumber : Data Primer Diolah *Spss.17*. 2014

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sehingga seluruh item-item pertanyaan dalam kuesioner yang mewakili variable penelitian ,yaitu : keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan, perilaku tidak etis dan kecenderungan *fraud* dapat dinyatakan reliabel/handal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

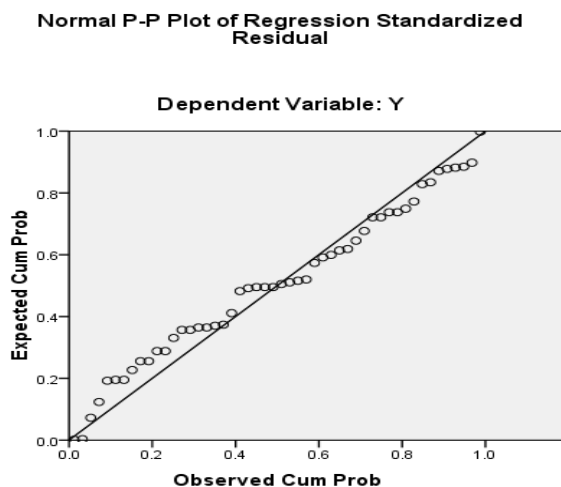
4.4 Uji Asusmsi Klasik

Uji asumsi kalsik dilakukan untuk menghindari hasil bias pada setiap variable yang nantinya akan di uji regresi liner berganda. Sebagai syarat untuk memenuhi hal tersebut adapun beberapa uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Normal atau tidaknya suatu data dalam penelitian dapat dilihat melalui grafik *Normal Probability Plot*. Grafik tersebut akan memperlihatkan keadaan kenormalan data apabila garis atau *plot* yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal lurus kekanan atas yang terdapat pada grafik. Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil sebagai berikut :

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Sumber : Data Diolah SPSS.17 2014

Hasil uji normalitas menunjukkan titik penyebaran data berada di sekita garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data dan distribusi data pada penelitian ini dinyatakan normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui gejala korelasi antar variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) dan melihat nilai *tolerance*. Apabila $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala multikolinieritas yang berarti antar variable bebas satu dengan variable bebas yang lain memiliki korelasi. Hasil uji multikolinieritas pada variabel bebas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
KPI	0,965	1,036	Tidak Multikolinieritas
KA	0,960	1,042	Tidak Multikolinieritas
PTE	0,944	1,059	Tidak Multikolinieritas

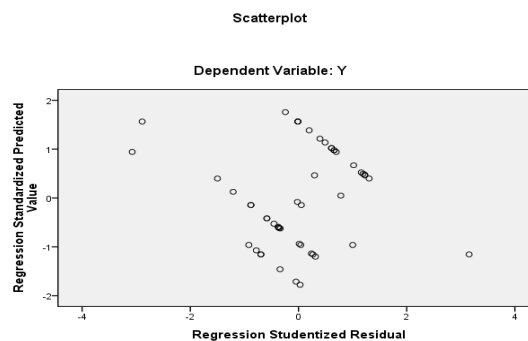
Sumber : Data Primer Diolah *Spss.17*,2014.

Dari hasil perhitungan uji multikolinieritas, terlihat bahwa seluruh variable bebas yang di jadikan predictor dalam penelitian ini memiliki $VIF < 10$ dan *Tolaracne* lebih besar daro 0,10 atau sebesar 10%. Maka dapat dinyatakan variable bebas dalam penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Gejala heterokedastisitas terjadi bila *distrurbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah model *chart* (diagram pencar). Hasil uji Heteroskedastisitas tersebut dapat terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah SPSS.17, 2014

Dari gambar 4.2 di atas dapat dilihat plot residual tersebar di atas dan di bawah titi 0, atau tidak membentuk pola U maupun pola U terbalik. Maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak akan terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.5.1 Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variable. Pengujian masing-masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing-masing koefisien regresi dengan uji signifikan t.

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$\text{KTF (Y)} = \alpha + \beta_1 \text{KPI (X1)} + \beta_2 \text{KA (X2)} + \beta_3 \text{PTE (X3)} + \varepsilon$$

Keterangan:

KTF (Y) = Kecenderungan Terjadinya *Fraud*

KPI (X1) = Kefektifan pengendalian Internal

KA (X2) = Ketidak taatan aturan

PTE (X3) = Perilaku tidak etis

α = konstanta, yaitu nilai KTF jika variabel KPI, KA, dan PTE bernilai nol

$\beta_1, \dots, \beta_4$ = koefisien regresi

ε = kesalahan residual (error)

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer *SPSS.17*. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan program SPSS, maka dapat diketahui besarnya nilai koefisien regresi. Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef. Regresi	Koef. Beta	t _{hitung}	Sig t	Keterangan
Konstanta	4,780		2,466	0,017	
KPI (X ₁)	-0,150	-0,234	-2,362	0,022	Signifikan
KA (X ₂)	-0,039	-0,062	-0,662	0,537	Tidak signifikan
PTE (X ₃)	0,658	0,760	7,574	0.000	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah Spss.17. 2014.

Apabila memperhatikan model regresi linear berganda maka didapat persamaan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat materialitas sebagai berikut:

$$Y = 4,780 + (-0,150)X_1 + (-0,039)X_2 + 0,658X_3$$

4.5.2 Hasil Pengujian Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat di ketahui nilai sig t untuk masing-masing variable bebasnya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkan dengan probabilitas t hitung yang besar nya kurang dai 0,05.

a. Pengujian sig t pada variable Keefektifan pengendalian Internal

Hasil uji hipotesis dapat di lihat pada tabel 4.9, variable keefektifan pengendalian internal mempunyai t_{hitung} sebesar -2,362 dan tingkat signifikansi 0,022. Hal ini berarti menolak H₀₁ dan menerima H_{a1}. Sehingga dapat dikatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa karena tingkat signifikansi keefektifan pengendalian internal lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi* dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang di kemukakan oleh (Wilopo, 2006) yang menyatakan *keefektifan pengendalian internal signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud*. Adanya pengendalian yang efektif akan membantu mengawasi pegawai untuk menanggulangi terjadinya *fraud*.

b. Pengujian sig t pada Variable Ketidaktaatatan

Hasil uji hipotesis kedua dapat dilihat dari tabel 4.9, variabel ketaatan aturan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -0,662 dan tingkat signifikansi 0,537. Hal ini berarti menerima H_{02} dan menolak H_{a2} , sehingga dapat dikatakan variable ketaatan aturan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa, dikarenakan signifikansi variable ketaatan aturan lebih besar dari 0,05.

Hasil uji ini menunjukkan arah negatif artinya variable ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilopo, 2006). Akan tetapi hasilnya tidak signifikan. Artinya, semakin pegawai tidak taat pada aturan semakin tinggi kecenderungan seorang pegawai melakukan *fraud* tetapi dalam penelitian ini aturan tidak terlalu

berpengaruh atau dapat dikatakan tidak selalu seorang pegawai yang melanggar aturan mengartikan pegawai tersebut sebagai *fraudster*.

c. Pengujian sig t pada Variabel Perilaku tidak etis

Hasil uji hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.9, variable perilaku tidak etis mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 7,574 dan signifikansi 0,000. Hal ini berarti menolak H_{03} dan menerima H_{a3} , sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Wilopo, 2006) diperoleh hasil bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

Perilaku tidak etis mendorong pegawai melakukan *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya negara,. Dalam konteks ini etika pribadi menjadi krusial, salah satu pola *fraudster* untuk melakukan *fraud* untuk kepentingannya sendiri dengan terbiasa berperilaku tidak etis, merupakan kewajaran bagi pegawai untuk menggunakan kekuasaan dan kedudukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam penelitian ini pada konteks pengadaan barang dan jasa perilaku tidak etis seperti menyalah gunakan wewenang dapat di contohkan kongkrit pemilihan pihak ketiga pemenang tender agar mendapatkan *fee* atas keberpihakan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi atas materialitas. Jadi, tidak tentu bahwa semakin tinggi tingkat keefektifan pengendalian internal, maka semakin rendah kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Ketaatan Aturan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi, tidak tentu bahwa semakin tingkat ketaatan aturan rendah, maka semakin terindikasi kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan Semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis maka semakin tinggi pula kecenderungan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian staf pada bagian pengadaan barang dan jasa pada 7 dinas di kota salatiga yaitu Bappeda, DPPKAD, Bag. Administasi Pembangunan Setda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Disdikpora, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan

Perikanan Kota Salatiga serta responden berhasil terkumpul sebanyak 50 orang. Sehingga sangat dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda.

2. Pengukuran data dengan kuesioner memiliki beberapa kelemahan dikarenakan pegawai menilai tentang dirinya sendiri mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal ketatan aturan, dan perilaku tidak etis.
3. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner pada saat jam kerja sehingga beberapa staf pengadaan ada yang menolak dikarenakan beberapa melakukan tinjauan tender maupun lelang pengadaan di lapangan. Sehingga didapatkan jumlah responden 50.
4. Adanya kelemahan menggunakan tiga variable bebas yaitu keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan dan perilaku tidak etis sehingga dimungkinkan ada variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kecenderungan terjadinya *fraud*.
5. Penelitian hanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sehingga data yang digunakan adalah hanya dari hasil kuesioner tidak terdapat wawancara langsung kepada pegawai yang bertugas di bagian pengadaan barang dan jasa.

5.3 Saran Penelitian

1. Kecenderungan terjadinya *fraud* tidak hanya bisa di tanggulangi dengan aspek pengendalian internal dan ketaatan aturan dikarenakan *fraudster*

akan selalu mencari peluang maupun kesempatan untuk menembus pengendalian internal maupun aturan yang berlaku. Moralitas sebagai cerminan pribadi dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* dalam konteks ini peneliti menyarankan adanya peningkatan etika serta moral pegawai untuk meanggulangi *fraud*. Tidak dipungkiri dibutuhkan pengendali eksternal yaitu BPKP yang independen untuk mengawasi kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan jumlah sampel dan memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya pada pemerintahan kota Salatiga. Selain itu metode pengambilan data tidak hanya melalui penyebaran kuisioner saja tetapi dengan menambahkan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden, sehingga data yang digali akan lebih konkrit dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian. Waktu penelitian diharapkan tidak dilakukan pada waktu sibuk. Sehingga lebih banyak lagi responden yang dapat dikumpulkan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal *fraudster*, aspek lintas ekonomi seperti psikologis maupun disiplin ilmu lain atau menggunakan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel

yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

5. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempertimbangkan tepat atau tidaknya butir-butir pernyataan yang ada pada kuesioner sehingga terhindar dari ketidakvalidan responden dalam menjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S. (2009). In *Fraud Examination*. Natorp Boulevard: South Westrn Cengage Learning.
- Amiruddin. (2012). ANALISIS POLA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Arens, A. A. (2008). *Auditing and Assurance services: an integrate aproch*. Ed 12th. USA: Pearson Education.
- Bahagia, N. (2006). *Sistem Inventori*. Bandung: ITB.
- COSO. (2004). *Enterprise Risk Management*. Commite of Sponsoring Orgnizations.
- Faisal, M. (2013). ANALISIS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS. *Accounting Analysis Journal*.
- Ghozali, P. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, R., & J. Ebert, R. (2006). *Manajemen Bisnis* . Jakarta: erlangga.
- Koroy, T. R. (2008). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*.
- Kurniawati, H. (2009). Analisis Modus Operandi Tindak Kecurangan Di Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD yang di Deteksi Oleh BKPP.

- Kusumawardhani, P. (2011). DETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD TRIANGLE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Fraud Laporan Keuangan*.
- Mardiasmo. (2009). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance. *Jurnal Auntansi Pemerintahan*, vol. 2.
- Maroney, J. J., & R, E. M. (2008). The effect of Moral Reasoning on Fincancial Reporting Decisions in a Post Sarbens-Oxely Enviroment. *Behavioral Research Accounting*.
- pramudita, a. (2013). ANALISIS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA. *Accounting Analysis Journal*.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suyoso, Y. H. (2010). PRAKTIK KECURANGAN AKUNTANSI DALAM PERUSAHAAN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Wilopo. (2006). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI: STUDI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG*.

LAMPIRAN KUISIONER

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bpk/ Ibu/ Sdr/i

Di Salatiga

Bersama ini saya,

Nama : Al Husna Bissidqi

NIM : 10312216

Prodi/Fakultas : Akuntansi/Fakultas Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Sedang melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS POLA KECENDERUNGAN TERJADINYA FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA SALATIGA”. Tujuan dari penelitian ini untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bpk/ Ibu/ Sdr/i untuk mengisi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini dengan lengkap. Sebagai peneliti saya memegang teguh etika penelitian dengan tidak membocorkan informasi yang Bpk/ Ibu/ Sdr/i isikan dalam angket.

Atas perhatian dan berkenaannya Bpk/ Ibu/ Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

KUESIONER PENELITIAN

1. Identitas Responden

Nama : _____ (boleh tidak diisi)

Umur : _____ th

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Lama Bekerja : _____ th

DAFTAR PERTANYAAN

Bapak/ibu diharapkan memilih salah satu dari jawaban yang tersedia. Berikan tanda √ (check list) untuk jawaban yang bapak/ibu pilih.

<u>Pilihan</u>	<u>Arti</u>
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
N	Netral (tidak dapat menentukan pilihan)
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Keefektifan Pengendalian Internal						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Dalam prakteknya di tempat saya bekerja penerepan wewenang dan tanggung jawab tidak terlalu di pentingkan	☐ — ☐ — ☐ — ☐ — ☐				
2	Di Dinas tempat saya bekerja, bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan sering kali lupa untuk mengotorisasi transaksi	☐ — ☐ — ☐ — ☐ — ☐				

3	Di Dinas tempat saya bekerja, pemeriksaan fisik atas kekayaan (kas , persediaan, dll) tidak di periksa secara rutin	
4	Di Dinas tempat saya bekerja, tidak dilakukan dokumentasi yang baik atas kegiatan operasional yang sudah berlangsung	
5	Penandatanganan atas dokumen penerimaan barang atas suatu transaksi boleh dilakukan siapa saja	
Ketaatan Aturan		
1	Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, penanggung jawab pengadaan barang dan jasa, discount atas suatu tender dapat dijadikan sebagai insentif	
2	Dalam menyusun laporan, terkadang terdapat suatu transaksi yang sebenarnya penting tetapi tidak di laporkan, karena justru akan merepotkan	
3	Dalam menyusun laporan , penanggung jawab penyusunan laporan di dinas ini harus berusaha membebaskan diri dari pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku	

4	Bila menyusun laporan mendapat kesulitan, maka penanggung jawab penyusun tugas boleh di wakikan	
5	Bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan laporan di dinas ini tidak harus menaati ketentuan akuntansi secara konsisten	
6	Dalam kenyataan bila menyusun laporan , penanggung jawab penyusun laporan di dinas ini tidak perlu menggunakan standar pelaporan	
Perilaku Tidak Etis		
1	Merupakan kewajaran menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	
2	Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi merupakan sesuatu yang wajar	
3	Merupakan suatu kewajaran bila pemenang tender dimintai tiket berlibur agar proyeknya dapat terlaksana	
4	Bila pimpinan tidak di kantor, seringkali beberapa pegawai meninggalkan kantor tanpa izin jelas.	

5	Merupakan hal yang biasa dan sering terjadi bila SPJ berbeda dengan kenyataan	
---	---	---

Kecenderungan kecurangan

Untuk jawaban nomor selanjutnya bapak/ibu diberikan contoh kasus. Berikan jawaban yang menurut bapak/ibu paling sesuai.

Dua bulan yang lalu Sivulan pindah ke dinas X serta di angkat menjadi pejabat pembuat komitmen. Selama tiga tahun ini laporan keuangan, berita acara dinas X telah di audit BPK dan selalu menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian.

Setelah enam bulan menjabat Sivulan menemukan bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan kegiatan pengadaan yang sebenarnya. Terdapat berbagai rekayasa akuntansi. Sehingga mengurangi efisiensi penggunaan anggaran.

Mengetahui hal ini, Sivulan menyampaikan permasalahan tersebut kepada kepala dinas X, namun kepala dinas meminta kepada Siwulan untuk tidak mengubah proses penyusunan laporan keuangan dan berita acara yang telah berjalan. Kepala dinas juga akan memberikan insentif jika Sivulan menyusun laporan dan berita acara sesuai dengan yang dikehendaki kepala dinas.

Nilailah keputusan kepala dinas tempat bapak/ibu bekerja bila kondisi yang di hadapi oleh Sivulan terjadi di tempat bapak/ibu bekerja.

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Jika saya menjadi Sivulan saya akan mendukung keputusan kepala dinas	☐	☐	☐	☐	☐
2	Jika saya menjadi sivulan, Saya setuju kepada keputusan kepala dinas dengan alasan untuk kepentingan lembaga	☐	☐	☐	☐	☐
3	Jika saya menjadi Sivulan saya tidak akan memberi tahu informasi tersebut kepada siapapun	☐	☐	☐	☐	☐
4	Gambaran keadaan yang terjadi pada uraian kasus lazim saya temukan	☐	☐	☐	☐	☐



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen Sukowati nomor 51 Salatiga kode Pos 50724 Telepon (0298) 325159

Fax. (0298) 325159 Website www.salatigakota.go.id

E-mail : kesbangpol@pemkot-salatiga.go.id

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 174 / 205

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : SD. 6/ 6/ 2/ 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan Riset, Survei dan Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ;
 3. Surat fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor : 050/DEK/10/Div.SDM/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, menyatakan **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama | : | AL Husna Bissidqi |
| b. NIM/ NIP | : | 10312216 |
| c. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| d. Program Studi | : | Akuntansi |
| e. Alamat Asal | : | Dsn. Krajan RT.1/RW.2 Kel. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang |
| f. Penanggungjawab | : | Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA |
| g. Maksud dan Tujuan | : | Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : "Analisis Pola Kecenderungan Terjadinya FRAUD Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Salatiga |
| h. Lokasi | : | DPPKAD Kota Salatiga; Bag. Administrasi Pembangunan Setda; Dinas Bina Marga & PSDA; Dinas Cipkataru; Disdikpora; Kantor Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Perikanan. |
- *
Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/ Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan tidak membahas masalah politik dan/ atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 - c. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
 - d. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan peraturan dan atau melanggar hukum yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 - e. Setelah Penelitian selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol Kota Salatiga.
- III. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari tanggal 5 Februari 2014 s.d 5 Mei 2014

Dikeluarkan di Salatiga

pada tanggal : 5 Februari 2014

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SALATIGA
KABID. KEWASPADAAN NASIONAL,


AGUS PRASETYO, S.IP

Pembina

NIP. 19590729 198103 1 007

Tembusan:

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
3. Kepala DPPAKAD Kota Salatiga;
4. Kepala Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Salatiga;
6. Kepala Disdikpora Kota salatiga;
7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 050/DEK/10/Div.SDM/I/2014
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

29 Januari 2014

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Al Husna Bissidqi
No. Mahasiswa : 10 312 216
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Bali No.6 Kp.Widoro Baru Depok Sleman DIY

Bermaksud mohon keterangan/data pada Fakultas Ekonomi yang Bapak pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : **“Analisis Pola Kecenderungan Terjadinya Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Salatiga ”**

Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo,SE.,M.Bus

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA
NIK. 88 312 0104

LAMPIRAN

Tabulasi Data Penelitian

Responden	K1	K2	K3	K4	K5	X1
1	1	1	2	1	1	6
2	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1	1	5
4	1	1	1	1	1	5
5	1	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	5
7	1	1	1	1	1	5
8	1	1	1	1	1	5
9	1	1	1	1	1	5
10	1	1	1	1	1	5
11	1	1	1	1	1	5
12	1	1	2	2	2	8
13	1	1	1	1	1	5
14	2	2	2	2	2	10
15	2	2	2	2	2	10
16	2	2	2	2	2	10
17	1	1	1	1	1	5
18	2	2	2	2	2	10
19	1	1	1	1	1	5
20	1	1	1	1	1	5
21	1	1	1	1	1	5
22	1	1	1	1	1	5
23	1	1	1	1	1	5
24	1	1	1	1	1	5
25	1	1	1	1	1	5
26	1	1	1	1	1	5
27	1	1	1	1	1	5
28	1	1	1	1	1	5
29	2	2	1	1	1	7
30	2	2	2	2	2	10
31	2	2	2	2	2	10
32	2	2	2	2	2	10
33	2	2	2	2	2	10
34	2	2	2	2	2	10
35	2	2	2	2	2	10
36	2	2	2	2	2	10
37	2	2	2	2	2	10
38	2	2	2	2	2	10

39	1	1	1	1	2	6
40	2	2	2	2	2	10
41	2	2	2	2	2	10
42	2	2	2	2	2	10
43	1	1	1	1	2	6
44	2	2	2	2	2	10
45	1	1	1	1	2	6
46	2	2	2	2	2	10
47	2	2	2	2	2	10
48	1	1	1	1	1	5
49	1	1	1	1	1	5
50	1	1	1	1	2	6
KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	X2
1	4	4	4	4	1	18
5	4	5	4	4	5	27
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
1	4	5	5	1	5	21
5	4	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
1	5	5	5	5	5	26
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	5	5	26
4	2	5	5	5	4	25
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	2	4	4	22
2	2	4	2	2	1	13
2	4	4	4	4	4	22
4	4	4	2	2	2	18
4	2	4	2	2	4	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	2	2	2	18

4	4	4	1	2	2	17
2	2	2	1	1	1	9
2	2	2	2	2	2	12
5	5	5	5	5	5	30
1	4	4	4	4	4	21
1	5	4	4	4	4	22
5	5	5	4	4	4	27
2	4	5	4	5	2	22
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	2	4	4	22
2	2	5	5	5	5	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	2	22
4	4	2	4	4	4	22

P1	P2	P3	P4	P5	X3
5	4	4	4	4	21
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
4	4	5	5	5	23
4	5	5	5	5	24
5	4	4	4	4	21
5	5	4	4	4	22
5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21

5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	4	21
5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
5	5	4	4	4	22
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
4	4	5	5	5	23
4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	5	4	5	5	23
4	4	4	5	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
KF1	KF2	KF3	KF4	Y	
4	4	4	4	16	
5	5	5	5	20	
5	5	5	5	20	
4	4	4	4	16	
5	5	5	5	20	
5	4	4	5	18	

4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	5	5	4	18
4	5	4	4	17
4	5	5	4	18
4	5	4	4	17
4	5	4	4	17
4	5	4	4	17
5	5	5	5	20
5	4	5	5	19
5	5	5	5	20

4	4	5	4	17
---	---	---	---	----

IV. Hasil Olah data

I. Statistik Deskriptif

Statistics

		K1	K2	K3	K4	K5
N	Valid	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0

K1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	24	48.0	48.0	48.0
	2.00	24	48.0	48.0	96.0
	4.00	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

K2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	25	50.0	50.0	50.0
	2.00	25	50.0	50.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	24	48.0	48.0	48.0
	2.00	25	50.0	50.0	98.0
	5.00	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

K4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	25	50.0	50.0	50.0
	2.00	25	50.0	50.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

K5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	24	48.0	48.0	48.0
	2.00	25	50.0	50.0	98.0
	5.00	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Statistics

		KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0

KA1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	18	36.0	36.0	36.0
	2.00	31	62.0	62.0	98.0
	4.00	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KA2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	27	54.0	54.0	54.0
	2.00	23	46.0	46.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KA3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	15	30.0	30.0	30.0
	2.00	35	70.0	70.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KA4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	18	36.0	36.0	36.0
	2.00	32	64.0	64.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KA5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	19	38.0	38.0	38.0
	2.00	28	56.0	56.0	94.0
	4.00	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KA6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	24	48.0	48.0	48.0
	2.00	26	52.0	52.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Statistics

		P1	P2	P3	P4	P5
N	Valid	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	28	56.0	56.0	56.0
	5.00	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	23	46.0	46.0	46.0
	5.00	27	54.0	54.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	27	54.0	54.0	54.0
	5.00	23	46.0	46.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	21	42.0	42.0	42.0
	5.00	29	58.0	58.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	20	40.0	40.0	40.0
	5.00	30	60.0	60.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Statistics

		KF1	KF2	KF3	KF4
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0

KF1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	28	56.0	56.0	56.0
	5.00	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KF2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	23	46.0	46.0	46.0
	5.00	27	54.0	54.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KF3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	15	30.0	30.0	30.0
	5.00	35	70.0	70.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

KF4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	28	56.0	56.0	56.0
	5.00	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

II. Uji Validitas Dan Reliabilitas

Correlations

		Correlations					
		K1	K2	K3	K4	K5	X1
K1	Pearson Correlation	1	.693**	.399**	.693**	.399**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000	.004	.000
	N	50	50	50	50	50	50
K2	Pearson Correlation	.693**	1	.604**	1.000**	.604**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
K3	Pearson Correlation	.399**	.604**	1	.604**	.338*	.728**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.016	.000
	N	50	50	50	50	50	50
K4	Pearson Correlation	.693**	1.000**	.604**	1	.604**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
K5	Pearson Correlation	.399**	.604**	.338*	.604**	1	.728**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.016	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1	Pearson Correlation	.780**	.933**	.728**	.933**	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	X2
KA1	Pearson Correlation	1	.370**	.691**	.519**	.502**	.435**	.758**
	Sig. (2-tailed)		.008	.000	.000	.000	.002	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
KA2	Pearson Correlation	.370**	1	.604**	.609**	.269	.726**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.008		.000	.000	.059	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
KA3	Pearson Correlation	.691**	.604**	1	.873**	.593**	.507**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
KA4	Pearson Correlation	.519**	.609**	.873**	1	.579**	.530**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
KA5	Pearson Correlation	.502**	.269	.593**	.579**	1	.310*	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000	.059	.000	.000		.028	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
KA6	Pearson Correlation	.435**	.726**	.507**	.530**	.310*	1	.722**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.028		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
X2	Pearson Correlation	.758**	.728**	.897**	.860**	.739**	.722**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	X3
P1	Pearson Correlation	1	.333*	.475**	.346*	.313*	.664**
	Sig. (2-tailed)		.018	.000	.014	.027	.000
	N	50	50	50	50	50	50

P2	Pearson Correlation	.333*	1	.369**	.190	.229	.572**
	Sig. (2-tailed)	.018		.008	.186	.109	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P3	Pearson Correlation	.475**	.369**	1	.704**	.672**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P4	Pearson Correlation	.346*	.190	.704**	1	.794**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.014	.186	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P5	Pearson Correlation	.313*	.229	.672**	.794**	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.027	.109	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3	Pearson Correlation	.664**	.572**	.865**	.814**	.806**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	KF1	KF2	KF3	KF4	Y
KF1 Pearson Correlation	1	.656**	.404**	1.000**	.943**
Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000	.000
N	50	50	50	50	50
KF2 Pearson Correlation	.656**	1	.184	.656**	.774**
Sig. (2-tailed)	.000		.201	.000	.000
N	50	50	50	50	50
KF3 Pearson Correlation	.404**	.184	1	.404**	.596**
Sig. (2-tailed)	.004	.201		.004	.000
N	50	50	50	50	50
KF4 Pearson Correlation	1.000**	.656**	.404**	1	.943**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004		.000

	N	50	50	50	50	50
Y	Pearson Correlation	.943**	.774**	.596**	.943**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	50	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KA1	8.0600	4.629	.630	.839
KA2	8.2800	4.940	.612	.842
KA3	8.0400	4.651	.850	.806
KA4	8.1000	4.663	.795	.813
KA5	8.0000	4.286	.551	.870
KA6	8.2200	4.951	.605	.843

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	18.1800	2.477	.467	.795
P2	18.0800	2.647	.345	.830
P3	18.1600	2.096	.765	.698
P4	18.0400	2.202	.685	.726
P5	18.0200	2.224	.675	.730

```
RELIABILITY /VARIABLES=KF1 KF2 KF3 KF4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.835	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KF1	13.6800	1.324	.886	.685
KF2	13.5800	1.596	.589	.826
KF3	13.4200	1.922	.359	.910
KF4	13.6800	1.324	.886	.685

III. Uji Regresi Linier Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	18.1200	1.61169	50
X1	7.7600	2.51169	50
X2	9.7400	2.56197	50
X3	22.6200	1.86142	50

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	-.114	.052	.709
	X1	-.114	1.000	.111	.168
	X2	.052	.111	1.000	.184
	X3	.709	.168	.184	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.216	.359	.000
	X1	.216	.	.222	.122
	X2	.359	.222	.	.100
	X3	.000	.122	.100	.
N	Y	50	50	50	50
	X1	50	50	50	50
	X2	50	50	50	50
	X3	50	50	50	50

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
-------	-------------------	-------------------	--------

1	X3, X1, X2 ^a	.	Enter
---	-------------------------	---	-------

a. All requested variables entered.

Hubungan Variable Independent dengan Variable Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.750 ^a	.563	.534	1.10006	2.570

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	71.614	3	23.871	19.726	.000 ^a
	Residual	55.666	46	1.210		
	Total	127.280	49			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Uji Regresi T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.780	1.938		2.466	.017		
	X1	-.150	.064	-.234	-2.362	.022	.965	1.036
	X2	-.039	.063	-.062	-.622	.537	.960	1.042
	X3	.658	.087	.760	7.574	.000	.944	1.059

a. Dependent Variable: Y

Uji Multikolinieritas

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.885	1.000	.00	.01	.00	.00
	2	.074	7.269	.00	.85	.21	.00
	3	.039	10.026	.04	.14	.78	.03
	4	.003	34.344	.96	.00	.00	.96

a. Dependent Variable: Y

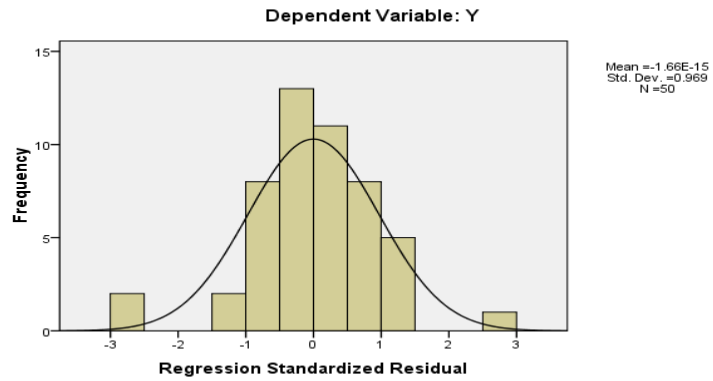
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15.9706	20.2473	18.1200	1.20893	50
Std. Predicted Value	-1.778	1.760	.000	1.000	50
Standard Error of Predicted Value	.210	.416	.307	.053	50
Adjusted Predicted Value	15.9670	20.3546	18.1208	1.21858	50
Residual	-3.26137	3.27724	.00000	1.06585	50
Std. Residual	-2.965	2.979	.000	.969	50
Stud. Residual	-3.075	3.153	.000	1.011	50
Deleted Residual	-3.50845	3.67122	-.00080	1.16183	50
Stud. Deleted Residual	-3.412	3.522	-.005	1.074	50
Mahal. Distance	.798	6.037	2.940	1.294	50
Cook's Distance	.000	.299	.023	.057	50
Centered Leverage Value	.016	.123	.060	.026	50

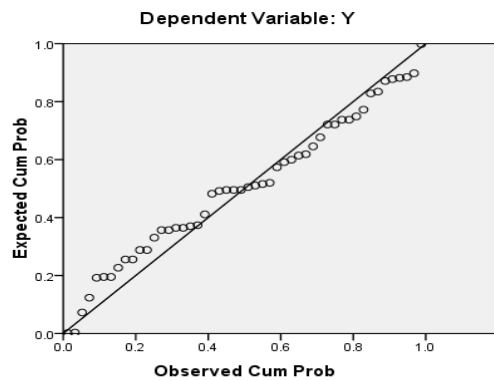
a. Dependent Variable: Y

Uji Normalitas dan Uji Heterokedastisitas

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

